



Laporan Akuntabilitas Kinerja 2025



Biro Perencanaan dan Keuangan

Kata Pengantar



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridhaNya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas implementasi program dan anggaran yang telah dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2025, sekaligus memenuhi kewajiban mandat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tahun 2025 memiliki makna strategis bagi perjalanan organisasi kita. Siklus Rencana Strategis (Renstra) DPD RI 2025-2029, menjadi pondasi krusial bagi transformasi Sekretariat Jenderal dalam memberikan penguatan dukungan administrasi kepada DPD RI. Sepanjang tahun 2025, berbagai capaian kinerja telah diraih di tengah dinamika pembangunan nasional.

Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran di Biro Perencanaan dan Keuangan serta seluruh pihak terkait yang telah bekerja keras dan bersinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja yang unggul. Semoga Laporan Kinerja Tahun 2025 ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja organisasi dan menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi pemangku kepentingan dalam mendukung cita-cita besar DPD RI di masa depan.

Jakarta, Januari 2026
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Sekretariat Jenderal DPD RI



HARTAWAN, S.IP.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I Pendahuluan	1
A. Uraian Singkat Organisasi	1
B. Mandat dan Peran Strategis	4
C. Sistematika Laporan	6
BAB II Perencanaan Kinerja	7
A. Rencana Strategis	7
B. Perjanjian Kinerja	8
C. Anggaran Tahun 2025	10
BAB III Akuntabilitas Kinerja	11
A. Capaian Kinerja	11
B. Analisis Capaian Kinerja	13
1. Sasaran 1	13
Analisis Capaian Kinerja SAKIP	13
Analisis Capaian Kinerja IPPN	21
Realisasi Anggaran	24
2. Sasaran 2	25
Analisis Capaian Kinerja IKPA	25
Realisasi Anggaran IKPA	28
Analisis Capaian Kinerja Opini BPK	29
Realisasi Anggaran Opini BPK	31
3. Sasaran 3	32
Analisis Capaian Prioritas Nasional (PN)	32
Realisasi Anggaran Prioritas Nasional (PN)	34
Analisis Capaian IKU	35
Realisasi Anggaran IKU	36
4. Sasaran 4	37
Analisis Capaian Kinerja RB Tematik	45
Realisasi Anggaran RB Tematik	45
BAB IV Realisasi Biro Perencanaan dan Keuangan	46
BAB V Penutup	47

Ikhtisar Eksekutif

No	Sasaran	Indikator	Formula	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pengelolaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang berkualitas.	Nilai Capaian RB Pengelolaan Kinerja	Penjumlahan skor index dari Nilai SAKIP dan IPPN	4,8	4.75	98.96%
2	Meningkatnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.	Nilai capaian RB pengelolaan keuangan	Penjumlahan skor index IKPA dan Opini BPK	6,85	6,80	99,27%
3	Meningkatnya pengelolaan prioritas nasional	Nilai capaian pengelolaan prioritas nasional	Penjumlahan skor indeks Capaian Prioritas Nasional dan Capaian IKU Kementerian /Lembaga	5,97	6,87	115%
4	Meningkatnya upaya mengatasi permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.	Nilai capaian RB upaya mengatasi permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat	Penjumlahan skor indeks capaian RB Tematik	8,18	7,55	92%

BAB I

Pendahuluan

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit kerja level Eselon II yang berada di bawah naungan Deputy Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Kedudukan strategis ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal DPD RI. Guna memperkuat tata kerja organisasi, ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 3 Tahun 2022. Landasan hukum ini menegaskan peran penting. Biro Perencanaan dan Keuangan dalam manajemen sumber daya organisasi untuk mendukung tugas-tugas konstitusional lembaga.

A. Uraian Singkat Organisasi

Pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI memerlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama Sekretariat Jenderal DPD RI. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas DPD RI, dibentuk Sekretariat Jenderal yang susunan dan tata kerjanya diatur melalui Peraturan Presiden atas usul masing-masing lembaga.

Sebagai tindak lanjut, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal DPD RI, yang membawa perubahan pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal. Perubahan ini diimplementasikan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017, yang kemudian disesuaikan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 8 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut, Sekretariat Jenderal DPD RI memiliki tugas memberikan dukungan administrasi dan keahlian guna mendukung pelaksanaan tugas DPD RI. Struktur organisasi Sekretariat Jenderal terdiri dari Deputy Bidang Administrasi dan Deputy Bidang Persidangan.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Nomor 8 Tahun 2018, dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 3 Tahun 2022, Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki tanggung jawab untuk :

1. Melakukan koordinasi, perumusan kebijakan, dan dukungan operasional di bidang perencanaan program dan anggaran;
2. Mengelola administrasi gaji, tunjangan, dan honorarium;
3. Mengatur perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan.

Fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan :

1. Penyiapan koordinasi dalam perencanaan, administrasi gaji, tunjangan, honorarium, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan;
2. Penyusunan kebijakan terkait bidang-bidang tersebut;
3. Pelaksanaan dukungan administrasi dan operasional;
4. Penyusunan evaluasi serta laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro.

Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki empat unit kerja Eselon III, yaitu:

1. Bagian Perencanaan: Bertugas menyiapkan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan dalam perencanaan di lingkungan Sekretariat Jenderal.
2. Bagian Administrasi Gaji, Tunjangan, dan Honorarium: Bertugas mengelola koordinasi, kebijakan, dan pelaksanaan dukungan administrasi terkait gaji, tunjangan, dan honorarium bagi anggota DPD RI dan pegawai di Sekretariat Jenderal.
3. Bagian Perbendaharaan: Mengurus koordinasi, kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang perbendaharaan.
4. Bagian Akuntansi dan Pelaporan: Menangani koordinasi, kebijakan, dan pelaksanaan dukungan dalam akuntansi dan pelaporan.

Struktur ini memastikan setiap tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan terlaksana secara profesional dan efisien.



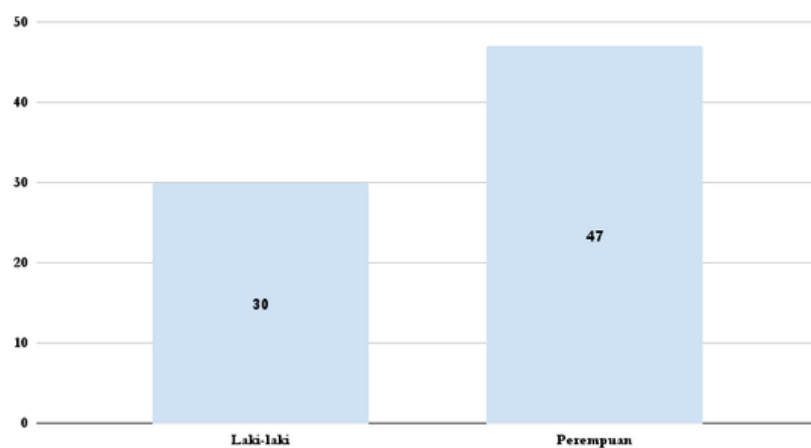
Demografi Pegawai

Sumber daya manusia merupakan aset strategis dalam mewujudkan tata kelola perencanaan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada kinerja. Pada tahun 2025, Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI didukung oleh SDM dengan karakteristik demografis yang beragam. Keberagaman ini menjadi modal penting dalam memperkuat daya dukung organisasi terhadap dinamika tugas yang semakin kompleks.

Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki : 30 orang
Perempuan : 47 orang

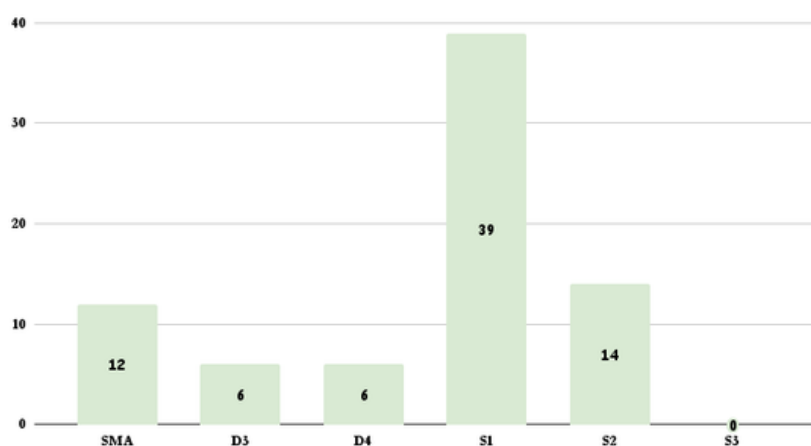
Jenis Kelamin



Berdasarkan Pendidikan

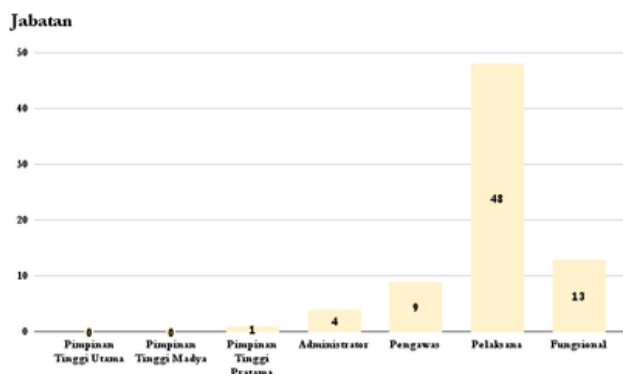
SMA : 12 orang
D3 : 6 orang
D4 : 6 orang
S1 : 39 orang
S2 : 14 orang
S3 : 0 orang

Pendidikan



Berdasarkan Jabatan

Pimpinan Tinggi Utama	: 0 orang
Pimpinan Tinggi Madya	: 0 orang
Pimpinan Tinggi Pratama	: 1 orang
Administrator	: 4 orang
Pengawas	: 9 orang
Pelaksana	: 48 orang
Fungsional	: 13 orang



B. Mandat dan Peran Strategis

Sumber daya manusia di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI memiliki mandat utama untuk mendukung penyelenggaraan fungsi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian keuangan negara secara akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja. Mandat ini dijalankan melalui penyediaan aparatur yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menerjemahkan kebijakan strategis DPD RI ke dalam proses kerja yang terukur dan berdampak.

Secara strategis, Biro Renkeu berperan dalam:

- 1. Pengarah Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran** – Biro Renkeu menjadi penghubung antara arah kebijakan strategis DPD RI dengan implementasi program dan kegiatan tahunan. Peran ini mencakup penyusunan dokumen perencanaan, integrasi antara visi misi lembaga dengan kerangka anggaran, serta penyelarasan antar unit kerja agar bergerak dalam satu arah yang sama.
- 2. Penjamin Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** – Melalui fungsi pengendalian, pelaporan, dan evaluasi, Biro Renkeu memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, substantif, dan publik. Peran ini menjadi fondasi bagi terwujudnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap tata kelola DPD RI.
- 3. Pengelola Sistem dan Proses Bisnis Organisasi** – Biro Renkeu berperan dalam membangun sistem kerja yang terstruktur, terdokumentasi, dan berbasis data, termasuk melalui penguatan sistem informasi perencanaan dan keuangan. Peran ini penting untuk menjamin kesinambungan proses, efisiensi, serta konsistensi kebijakan.

4. **Akselerator Transformasi dan Inovasi Tata Kelola** - Dalam menghadapi dinamika regulasi, tuntutan transparansi publik, dan perkembangan teknologi, Biro Renkeu menjadi penggerak transformasi birokrasi, baik melalui digitalisasi proses, penyederhanaan prosedur, maupun penerapan praktik-praktik kerja baru yang lebih adaptif.
5. **Penguat Sinergi Kelembagaan** - Sebagai unit yang bersifat lintas fungsi, Biro Renkeu berperan mengintegrasikan kepentingan berbagai unit kerja agar perencanaan dan penganggaran tidak berjalan sektoral, melainkan saling mendukung dan berorientasi pada tujuan kelembagaan.

Isu-Isu Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Dalam menjalankan perannya, Biro Renkeu menghadapi sejumlah isu strategis yang perlu dikelola secara sistematis, antara lain:

1. **Kompleksitas Regulasi dan Dinamika Kebijakan Publik** - Perubahan regulasi yang cepat, baik di bidang perencanaan, keuangan negara, maupun akuntabilitas kinerja, menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi. Tantangannya bukan hanya pada aspek kepatuhan, tetapi juga pada kemampuan menerjemahkan regulasi ke dalam praktik kerja yang operasional dan efektif.
2. **Transisi dari Orientasi Proses ke Orientasi Hasil (Outcome Oriented)** - Salah satu isu utama adalah penguatan paradigma kinerja yang tidak lagi berfokus pada serapan anggaran semata, melainkan pada dampak dan manfaat program. Hal ini menuntut penguatan kapasitas analitis, pemanfaatan data, serta perubahan budaya kerja.
3. **Kesenjangan Kompetensi dan Regenerasi SDM** - Profil demografis SDM yang beragam menjadi potensi sekaligus tantangan. Diperlukan strategi pengelolaan talenta, transfer pengetahuan antar generasi, serta penguatan kompetensi digital dan kebijakan agar tidak terjadi kesenjangan kapasitas.
4. **Integrasi Sistem Informasi dan Kualitas Data** - Transformasi digital belum sepenuhnya diikuti oleh integrasi sistem dan standarisasi data. Isu ini berdampak pada konsistensi pelaporan, kecepatan pengambilan keputusan, dan efektivitas pengendalian kinerja.
5. **Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas Publik** - Meningkatnya ekspektasi publik terhadap keterbukaan informasi dan tata kelola yang bersih menuntut Biro Renkeu untuk tidak hanya patuh pada regulasi, tetapi juga proaktif membangun sistem yang mudah diakses, dipahami, dan diverifikasi.

C. Sistematika Laporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berfungsi untuk menyampaikan pencapaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2025, adapun penyampaian disampaikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta uraian mengenai mandat dan peran strategis Biro Perencanaan dan Keuangan termasuk permasalahan strategis yang dihadapi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan Rencana Strategis Tahun 2025–2029 yang menggambarkan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja strategis yang menjadi arah pencapaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan. Selain itu, disajikan Matriks Perencanaan Kinerja yang menjelaskan keterkaitan antara sasaran, indikator kinerja, target, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan. Bab ini juga menguraikan Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 yang berisi komitmen kinerja Kepala Biro dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai penutup, disampaikan penjelasan mengenai Anggaran Tahun 2025 yang meliputi pagu anggaran, alokasi anggaran, serta kebijakan penganggaran yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan pengukuran kinerja yang menyajikan capaian indikator kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, analisis capaian kinerja yang memuat evaluasi terhadap faktor-faktor pendukung dalam pencapaian target kinerja serta perbandingan hasil capaian kinerja dengan tingkat capaian nasional.

Bab IV Penutup

Pada bab ini dijelaskan kesimpulan umum sebagai gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan serta upaya peningkatan kinerja pada tahun mendatang yang berisi rekomendasi dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun selanjutnya.

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis DPD RI adalah dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahun) DPD RI yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi DPD RI, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif.

Sedangkan Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan platform Unit Biro Perencanaan dan Keuangan atas pelaksanaan Visi dan Misi DPD RI dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Selain itu juga menjadi dasar penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan.

Mengingat Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi DPD RI, maka Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran adalah sebagai berikut:

Visi Renstra DPD RI

DPD RI menjadi Parlemen yang kuat, aspiratif, berkelanjutan dan inklusif dalam memperjuangkan kepentingan daerah menuju Indonesia Emas 2045.

Misi DPD RI

- Meningkatkan Peran DPD RI dalam Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran dalam Kerangka Fungsi Representasi.
- Meningkatkan Sinergitas Hubungan DPD RI dengan Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah.
- Memperkuat Kelembagaan DPD RI yang Responsif, Efektif dan Efisien.

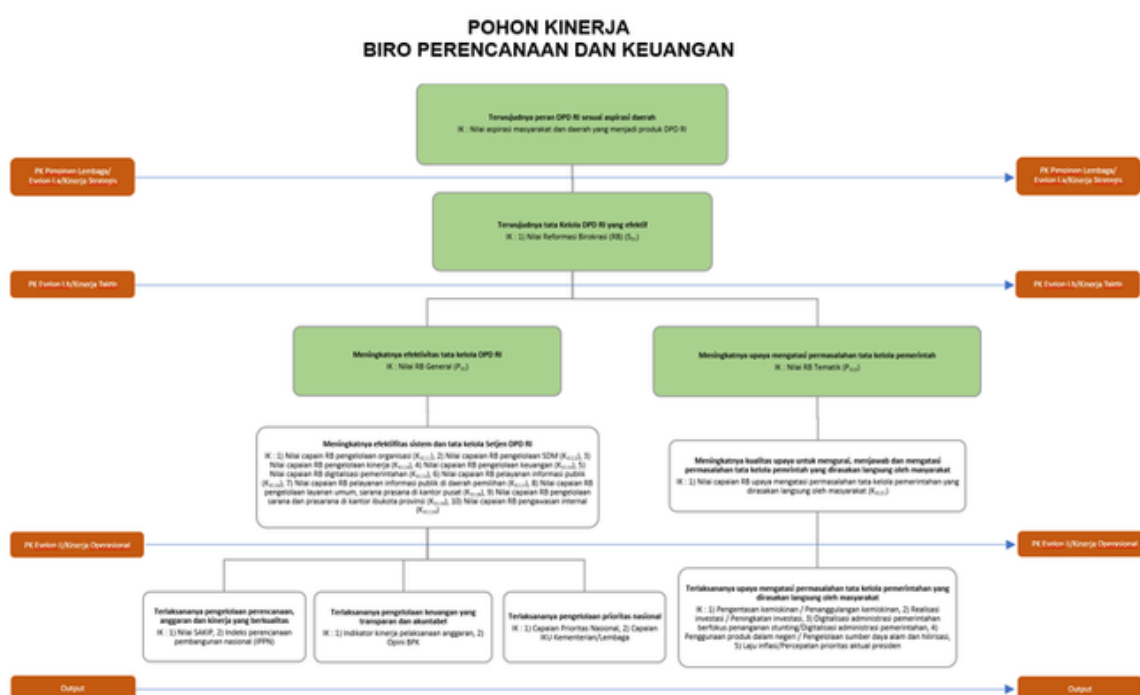
Tujuan

Terwujudnya peran DPD RI sesuai aspirasi daerah.

Sasaran Strategis DPD RI

- Meningkatnya kualitas legislasi RUU (termasuk memberikan pandangan dan pendapat serta pertimbangan atas RUU).
- Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya (termasuk pemantauan dan peninjauan serta pemantauan dan evaluasi perda dan Ranperda),
- Terwujudnya tata kelola Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang efektif.

Pohon Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan dan Cascading sesuai Renstra



B. Perjanjian Kinerja

Sebagai unit strategis yang memegang peran sentral dalam penguatan tata kelola perencanaan dan pengelolaan keuangan, Biro Perencanaan dan Keuangan dihadapkan pada dinamika lingkungan kerja yang semakin kompleks, tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi, serta kebutuhan akan sistem kerja yang adaptif dan berbasis hasil. Kondisi ini menuntut adanya kejelasan arah, fokus, dan ukuran keberhasilan yang dapat dipahami bersama oleh seluruh unsur organisasi.

Dalam konteks tersebut, perjanjian kinerja menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap sasaran, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Renkeu tidak hanya selaras dengan arah kebijakan strategis DPD RI, tetapi juga dapat diukur, dipantau, dan dipertanggungjawabkan secara sistematis. Perjanjian kinerja tidak sekadar dimaknai sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai bentuk komitmen manajerial antara pimpinan dan seluruh jajaran dalam mewujudkan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome-oriented*).

Lebih dari itu, perjanjian kinerja menjadi sarana untuk menerjemahkan visi, misi, serta isu-isu strategis organisasi ke dalam target yang konkret, realistis, dan berdampak. Dengan pendekatan ini, setiap pegawai tidak hanya memahami apa yang harus dikerjakan, tetapi juga mengapa hal tersebut penting bagi pencapaian tujuan kelembagaan.

Oleh karena itu, penyusunan perjanjian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan mandat organisasi, peran strategis biro, karakteristik sumber daya manusia, serta tantangan yang dihadapi. Hal ini bertujuan agar seluruh komitmen kinerja yang ditetapkan tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar menjadi pedoman kerja yang operasional, adaptif, dan berkelanjutan.

Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan ditandatangani pada bulan Januari dan Agustus tahun 2025.


**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pengelolaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang berkualitas	Nilai capaian RB pengelolaan kinerja (K ₀₁₁₁)	4,8
2	Meningkatnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Nilai capaian RB pengelolaan keuangan (K ₀₁₁₁)	6,85
3	Meningkatnya pengelolaan prioritas nasional	Nilai capaian pengelolaan prioritas nasional (K ₀₁₁₁)	5,97
4	Meningkatnya upaya mengatasi permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat	Nilai capaian RB upaya mengatasi permasalahan tata Kelola pemerintahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat (K ₀₁₁₁)	8,18

Kegiatan / RO	Anggaran
A. Pengelolaan perencanaan dan keuangan	Rp 488.472.894.000
1 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 1.015.000.000
2 955 - Layanan Manajemen Keuangan	Rp 2.114.500.000
3 994 - Layanan Perkantoran	Rp 168.890.880.000
4 994 - Layanan Perkantoran	Rp 315.155.514.000
5 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 1.297.000.000

PIHAK KEDUA



Dr. Lulu Nioman Zahir, S.Sos., M.Si.
NIP.196801051988031001

Jakarta, 6 Agustus 2025
PIHAK PERTAMA



Hartawan, S.IP
NIP. 197002261997031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (B2-E), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).


**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pengelolaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang berkualitas	Nilai capaian RB pengelolaan kinerja (K ₀₁₁₁)	4,8
2	Meningkatnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Nilai capaian RB pengelolaan keuangan (K ₀₁₁₁)	6,85
3	Meningkatnya pengelolaan prioritas nasional	Nilai capaian pengelolaan prioritas nasional (K ₀₁₁₁)	5,97
4	Meningkatnya upaya mengatasi permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat	Nilai capaian RB upaya mengatasi permasalahan tata Kelola pemerintahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat (K ₀₁₁₁)	8,18

Kegiatan / RO	Anggaran
A. Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Setjen DPD RI	Rp 173.317.380.000
1 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 925.000.000
2 955 - Layanan Manajemen Keuangan	Rp 2.204.500.000
3 994 - Layanan Perkantoran	Rp 168.890.880.000
4 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 1.297.000.000
B. Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Setjen DPD RI	Rp 315.155.514.000
1 994 - Layanan Perkantoran	Rp 315.155.514.000

PIHAK KEDUA



Dr. Lulu Nioman Zahir, S.Sos., M.Si.
NIP.196801051988031001

Jakarta, 2 Januari 2025
PIHAK PERTAMA



Hartawan, S.IP
NIP. 197002261997031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (B2-E), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. Anggaran Tahun 2025

Pada tahun 2025, anggaran di Biro Perencanaan dan Keuangan mengalami perubahan, pada bulan Januari sesuai dengan DIPA definitif dan mengalami perubahan sesuai di bulan Agustus 2025.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Bulan Januari 2025

Kegiatan / RO			Anggaran
A.	Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Setjen DPD RI		Rp 173.317.380.000
	1	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 925.000.000
	2	955 - Layanan Manajemen Keuangan	Rp 2.204.500.000
	3	994 - Layanan Perkantoran	Rp 168.890.880.000
	4	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 1.297.000.000
B.	Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Setjen DPD RI		Rp 315.155.514.000
	1	994 - Layanan Perkantoran	Rp 315.155.514.000

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Bulan Agustus 2025

Kegiatan / RO			Anggaran
A.	Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Setjen DPD RI		Rp 488.472.894.000
	1	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 1.015.000.000
	2	955 - Layanan Manajemen Keuangan	Rp 2.114.500.000
	3	994 - Layanan Perkantoran	Rp 168.890.880.000
	4	994 - Layanan Perkantoran	Rp 315.155.514.000
	5	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 1.297.000.000

BAB III

Akuntabilitas

Kinerja

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan refleksi atas tingkat keberhasilan organisasi dalam merealisasikan komitmen yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja. Pada bagian ini, kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan disajikan sebagai hasil dari proses perencanaan yang terarah, pelaksanaan yang terkoordinasi, serta pengendalian yang berkelanjutan sepanjang tahun 2025.

Pengukuran capaian kinerja tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan target secara kuantitatif, tetapi juga sebagai gambaran kualitas pelaksanaan tugas, efektivitas strategi yang diterapkan, serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan strategis DPD RI. Dengan demikian, capaian kinerja diposisikan sebagai instrumen evaluatif sekaligus pembelajaran organisasi untuk perbaikan berkelanjutan.

Dalam penyajiannya, capaian kinerja Biro Renkeu dianalisis berdasarkan indikator kinerja utama dan indikator pendukung yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan keterkaitan antara input, proses, output, dan outcome. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kinerja biro, tidak hanya dari sisi realisasi anggaran, tetapi juga dari sisi manfaat, dampak, dan nilai tambah bagi organisasi.

Melalui penyajian capaian kinerja ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh pemahaman yang objektif mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan tugas Biro Perencanaan dan Keuangan, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan strategi perbaikan dan penguatan kinerja pada periode berikutnya.

No	Sasaran	Indikator	Formula	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pengelolaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang berkualitas.	Nilai Capaian RB Pengelolaan Kinerja	Penjumlahan skor index dari Nilai SAKIP dan IPPN	4,8	4.75	98.96%
2	Meningkatnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.	Nilai capaian RB pengelolaan keuangan	Penjumlahan skor index IKPA dan Opini BPK	6,85	6,80	99,27%
3	Meningkatnya pengelolaan prioritas nasional	Nilai capaian pengelolaan prioritas nasional	Penjumlahan skor indeks Capaian Prioritas Nasional dan Capaian IKU Kementerian/ Lembaga	5,97	6,87	115%
4	Meningkatnya upaya mengatasi permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.	Nilai capaian RB upaya mengatasi permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat	Penjumlahan skor indeks capaian RB Tematik	8,18	7,55	92%

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran 1 : Meningkatnya pengelolaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang berkualitas.

No	Sasaran	Indikator	Formula	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pengelolaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang berkualitas.	Nilai Capaian RB Pengelolaan Kinerja	Penjumlahan skor index dari Nilai SAKIP dan IPPN	4,8	4.75	98.96%

Biro Perencanaan dan Keuangan berkomitmen mewujudkan tata kelola perencanaan, anggaran, dan kinerja yang berkualitas sebagai pilar utama akuntabilitas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Upaya ini diimplementasikan melalui sinkronisasi kebijakan anggaran yang ketat terhadap target strategis dalam Renstra 2025-2029 guna menjamin efektivitas kelembagaan. Dengan manajemen yang sistematis, setiap alokasi sumber daya dipastikan memiliki landasan perencanaan yang kuat serta berorientasi penuh pada pencapaian hasil yang nyata bagi organisasi. Keberhasilan sasaran strategis tersebut tercermin secara komprehensif melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Capaian RB Pengelolaan Kinerja, yang merupakan penggabungan skor indeks SAKIP dan IPPN. Pada tahun 2025 Biro Renkeu memiliki target 4,8.

Analisis Capaian Kinerja SAKIP

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pedoman dan penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Pengukuran atas indikator sasaran Nilai AKIP Sekretariat Jenderal DPD RI di luar nilai evaluasi Internal terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja. Untuk nilai Evaluasi Internal dilaksanakan oleh unit kerja Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI.

	2023	2024	2025
Perencanaan Kinerja	21.93	22.19	22.39
Pengukuran Kinerja	21.79	22.09	22.13
Pelaporan Kinerja	10.98	11.15	11.18
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	12,37	12,87	13.06
Total Nilai	67,07	68,30	68.77

Nilai SAKIP pada tahun 2025 sebesar 68,77. Biro Perencanaan dan Keuangan telah melakukan beberapa hal yang dapat meningkatkan keberhasilan SAKIP antara lain karena sudah dilaksanakannya kegiatan rekomendasi tindak lanjut dari LHE SAKIP sebelumnya, yaitu:

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Bukti Dukung	Status/Progress Penyelesaian
1	Melakukan revidi terhadap perencanaan kinerja untuk memastikan pemilihan indikator sasaran kinerja yang dipilih telah memenuhi kriteria SMART dan cukup;	- Penyusunan Rancangan Renstra DPD RI dengan menggunakan indikator kinerja atas setiap Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang memenuhi kriteria SMART - Penyusunan ulang Pohon Kinerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2022 yang selaras dengan penjenjangan kinerja pada Rancangan Renstra DPD RI Tahun 2025-2029 - Melakukan konsultasi dengan beberapa instansi Mitra seperti Bappenas, DJA, KemenPAN RB dan BPKP terhadap konsep penetapan indikator kinerja	Dokumentasi Konsultasi Indikator Sasaran Strategis Rancangan Renstra DPD RI Tahun 2025 ke Kementerian PANRB dan BPKP: https://drive.google.com/drive/folders/19nu81HFdKXbr7qdOD7lufebrnkD99Hlo?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1Fo4M7Xv8jBV6mHsEt8YDMxoyRI3cbuXv?usp=sharing Rekaman zoom meeting forum penyesuaian Renstra DPD RI Tahun 2025 yang dihadiri oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan BPKP pada tanggal 19 Juni 2025, pukul 13.30 WIB https://dprd-go-id.zoom.us/rec/share/M6fC5Ob90QOC_aNDGPDkwwqsTvNpF9XNJHw-WbACAufIRmI2ephxZbKULJyZgykc.5H_ZeolEgULpoAlv	Dokumen Renstra akan disahkan pada bulan Oktober 2025

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Bukti Dukung	Status/Progress Penyelesaian
2	Melanjutkan penyempurnaan penjenjangan kinerja dengan memastikan penyusunan pohon kinerja menggunakan Critical Success Factor (CSF) dari kinerja yang akan dicapai, dan pola hubungan logis sebab-akibat serta berisi solusi/alternatif pemecahan masalah yang dibutuhkan sesuai dengan kinerja yang ingin diwujudkan;	· Melakukan penyusunan pohon kinerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2022 · Meminta masukan dan koreksi terhadap konsep pohon kinerja yang dibuat kepada Tim Menpan RB · Finalisasi penyusunan pohon kinerja dengan memisahkan cakupan kewenangan Sesjen DPD RI – Deputi DPD RI dan Karo/Pusat/Inspektorat dan Kantor Daerah DPD RI di Ibukota Provinsi · Mengupload pohon kinerja setelah renstra disahkan pada website esr.menpan.go.id	Melakukan kegiatan Penyusunan Pohon Kinerja https://drive.google.com/drive/folders/1mYt4Q_iKeKOYxPgvgLn12iiVQZFwx7tA?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/14K0XMs-bDOt8iwfUnnS4IFb2IJ4hit5r?usp=sharing Melakukan konsultasi dengan Kementerian PANRB dan Pakar dalam penyusunan Pohon Kinerja dan juga Perjanjian Kinerja https://drive.google.com/drive/folders/1DdnJo8vpUEwPBIN6qCPQGatR58GuUJB?usp=sharing Dokumen Pohon Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI dapat diakses pada link berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1FVDbY20PpoBMAF-H7B4yOXsbOlwxS00?usp=sharing	· Sudah dilakukan beberapa kegiatan penyusunan Pohon Kinerja, sbb: – Tanggal 6 Maret 2025; – Tanggal 11 Maret 2025; – Tanggal 17 Maret 2025. · Konsultasi dengan MenPAN RB terkait Penyusunan Pohon Kinerja pada tanggal 11 April 2025
3	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang dimiliki sebagai media pengukuran dan pemantauan kinerja yang berfokus pada pencapaian kinerja strategis, bukan hanya melihat pada realisasi anggaran dan realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan;	Melakukan pemutakhiran aplikasi eKinerja Setjen DPD RI dan melakukan sosialisasi pemanfaatan informasi pada aplikasi eKinerja kepada unit kerja di Setjen DPD RI	https://ekinerja.dpd.go.id/	· Sudah dilakukan sosialisasi

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Bukti Dukung	Status/Progress Penyelesaian
4	Memastikan kualitas pelaporan kinerja pada seluruh unit kerja dengan menyajikan analisis yang komprehensif terkait analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dari pencapaian kinerja dan analisis terkait upaya kedepan sehingga informasi laporan kinerja dapat digunakan sebagai umpan balik perbaikan kinerja tahun selanjutnya;	Penyusunan Persesjen tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, yang memuat point tentang analisis pencapaian kinerja yang memuat hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah antisipasi yang dilakukan	Membuat timeline penyusunan Laporan Kinerja untuk disampaikan ke unit kerja serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait progres penyusunan Laporan Kinerja https://drive.google.com/drive/folders/1PaR8Uw6itJyYYhFwhoYYICq0Ph-pZjH?usp=sharing	· Pasal 35 ayat (2) Persesjen DPD RI Nomor 7 Tahun 2024
5	Mereviu dan memperbaiki proses evaluasi SAKIP internal, dengan memastikan dilakukannya pendalaman terhadap data dukung tindak lanjut hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat agar menjamin bahwa tindak lanjut bukan sekedar pemenuhan atas dokumen saja, tetapi sampai pada implementasi secara nyata;	Bagian Perencanaan berkoordinasi dengan Inspektorat selaku APIP tentang tindak lanjut rekomendasi AKIP dari Kemenpan yang terkait Evaluasi AKIP Internal dengan melakukan beberapa hal berikut: 1. Memfasilitasi APIP untuk melakukan Bimbingan Teknis terkait Evaluasi AKIP Internal dengan Evaluatur dari KemenPANRB; 2. Memperbaiki kualitas LHE AKIP Internal; 3. Melakukan tindak lanjut LHE AKIP Internal	Melakukan koordinasi dengan Inspektorat selaku APIP dalam hal tindak lanjut rekomendasi Kementerian PANRB https://drive.google.com/drive/folders/1gEi9OAvF3X0mlxCX6ISx4Y_nTvTUm2t-?usp=sharing Melakukan Bimbingan Teknis dan Konsultasi terkait Evaluasi AKIP Internal dengan Evaluatur dari Kementerian PANRB https://drive.google.com/drive/folders/1cdtOperGAHlpJd3aXjm93VjQej37JzQz?usp=sharing	· Sudah dilakukan diskusi Evaluasi AKIP Internal pada tanggal 23 April 2025 · Sudah dilakukan konsultasi dan diskusi terkait Evaluasi AKIP Internal dengan Evaluatur dari KemenPANRB pada tanggal 28 Mei 2025

Foto Kegiatan SAKIP



Kegiatan Penyusunan Pohon Kinerja (6 Maret 2025)



Kegiatan Penyusunan Pohon Kinerja (17 Maret 2025)



Konsultasi dengan KemenPANRB dalam penyusunan Pohon Kinerja dan Perjanjian Kinerja (11 April 2025)



Koordinasi dengan Inspektorat selaku APIP dalam hal tindak lanjut rekomendasi KemenPANRB (23 April 2025)

Perbandingan Capaian SAKIP DPD RI dengan Capaian Nasional

DPD RI	Nasional	Capaian
68,77	73,61	93,42%

Nilai Skor Indeks SAKIP

Target	Realisasi	Capaian
2,8	2,75	98,21%

Hasil Evaluasi SAKIP Sekretaris Jenderal DPD RI

Tahun : 2025
 Periode : Final
 Penanggung Jawab : Andi Rahadian
 PIC LKE : Ainum Habibah

Komponen	Catatan	Rekomendasi	Tahun Lalu	Tahun Ini
Nilai Komponen Perencanaan Kinerja	Renstra sudah secara formal ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Berbeda dengan periode sebelumnya, Renstra DPD dan Renstra Sekretariat Jenderal DPD saat ini telah diintegrasikan menjadi Rencana Strategis DPD RI Tahun 2025-2029. Rumusan tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra DPD RI telah lebih berorientasi pada hasil. Namun demikian, oleh karena indikator kinerja sasaran strategis menjadi indikator kinerja DPD RI (ketua untuk indikator dukungan manajemen/Indeks Reformasi Birokrasi), maka pengendalian atas pencapaian kinerja tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan Sekretariat Jenderal DPD. Oleh karena itu perlu dipastikan adanya mekanisme pengukuran kinerja yang tepat agar ketercapaian kinerja tetap dapat dipantau dan dikendalikan secara berkala.	1. Menegaskan peran dan kontribusi Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra DPD RI, khususnya pada sasaran strategis yang indikator kinerjanya terintegrasi dengan DPD RI, dengan, misalnya menetapkan indikator antara (intermediate outcome) atau indikator dukungan yang berada dalam kendali Setjen DPD RI. 2. Menyusun mekanisme pengukuran kinerja yang jelas dan terukur untuk sasaran strategis bersama DPD RI, termasuk penetapan metode pengukuran, sumber data, frekuensi pengukuran, serta penanggung jawab, sehingga ketercapaian kinerja yang menjadi kontribusi Setjen DPD RI dapat tetap dipantau dan dievaluasi secara periodik.	22,19	22,39

Hasil Evaluasi SAKIP Sekretaris Jenderal DPD RI

Tahun : 2025
 Periode : Final
 Penanggung Jawab : Andi Rahadian
 PIC LKE : Ainum Habibah

Komponen	Catatan	Rekomendasi	Tahun Lalu	Tahun Ini
Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	Sekretariat Jenderal DPD RI saat ini mulai mengimplementasikan manajemen kinerja yang mengacu pada aplikasi e-kinerja.dpd.go.id, yang memungkinkan seluruh unit kerja mengunggah dokumen perencanaan serta melakukan penilaian mandiri atas kinerja secara bulanan yang kemudian diverifikasi oleh pimpinan atasan. Namun demikian, belum ditemukan notulensi rapat dalam pengisian evaluasi kinerja pada aplikasi e-kinerja.dpd.go.id pada Biro Risid I dan Puskad belum terdapat penilaian kinerja yang diinput sejak Januari hingga Desember 2025. Selain itu, pemanfaatan aplikasi tersebut dalam pengukuran kinerja secara berkala masih belum optimal. Pengukuran kinerja masih dilakukan secara manual sehingga belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem aplikasi yang tersedia.	1. Meningkatkan kepatuhan seluruh unit kerja dalam melakukan pengisian dan pelaporan kinerja secara berkala melalui aplikasi e-kinerja.dpd.go.id dengan menetapkan mekanisme pengendalian dan pengawasan oleh pimpinan unit kerja. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi e-kinerja.dpd.go.id sebagai instrumen utama dalam pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja secara berkala, termasuk dengan menegaskan pengukuran kinerja berbasis rencana aksi ke dalam sistem aplikasi agar pengukuran kinerja dapat dilakukan secara lebih sistematis, real time, dan andal.	22,09	22,13

Hasil Evaluasi SAKIP Sekretaris Jenderal DPD RI

Tahun : 2025
 Periode : Final
 Penanggung Jawab : Andi Rahadian
 PIC LKE : Ainum Habibah

Komponen	Catatan	Rekomendasi	Tahun Lalu	Tahun Ini
Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	Belum terdapat perbaikan yang signifikan atas kualitas Laporan Kinerja, baik pada tingkat pusat (Sekretariat Jenderal) maupun unit kerja. Laporan Kinerja di tingkat Setjen dan sebagian unit kerja masih belum menyajikan informasi perbandingan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya (hanya menampilkan perbandingan capaian tahun berjalan dengan satu tahun terakhir) serta belum menampilkan perbandingan dengan target akhir periode Renstra. Kondisi tersebut menyebabkan capaian kinerja pada masing-masing indikator belum dapat dianalisis secara komprehensif. Pada LAKIP unit kerja tingkat Biro/Bagian, analisis terhadap ketercapaian kinerja serta faktor-faktor penghambat dan pendorong pencapaian kinerja masih terbatas dan belum disajikan secara mendalam.	Menyempurnakan substansi Laporan Kinerja di tingkat Setjen dan unit kerja dengan menyajikan informasi capaian kinerja secara lebih komprehensif, antara lain melalui: 1. Penyajian perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan minimal dua sampai tiga tahun sebelumnya; 2. Penyajian perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan target akhir periode Renstra; 3. Penyajian analisis yang lebih komprehensif mengenai ketercapaian kinerja, termasuk identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pencapaian kinerja, serta strategi perbaikan ke depan. Dengan demikian, LAKIP dapat dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi kinerja yang andal dan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial.	11,15	11,18

Analisis Capaian Kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)

Fokus utama dalam penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kementerian/Lembaga (K/L) adalah mengukur kualitas hasil perencanaan yang dilakukan oleh masing-masing K/L. Terdapat beberapa aspek penilaian yang dijadikan sebagai dasar untuk mengukur kualitas hasil perencanaan dalam IPPN K/L tersebut, yang meliputi:

1. Integrasi

Aspek Integrasi ditujukan untuk mengukur keterpaduan perencanaan Pembangunan antar dokumen perencanaan dan merupakan koordinasi perencanaan di tingkat K/L pusat. Integrasi dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator, yaitu:

- Tingkat Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN.
- Tingkat Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L.
- Tingkat Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP.

2. Sinkronisasi

Aspek Sinkronisasi ditujukan untuk mengukur keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk mencapai sasaran dalam RKP dan Renja baik antar waktu, antar ruang dan antar fungsi. Sinkronisasi dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu:

- Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada Tahun Perencanaan.
- Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L.
- Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada Tahun Pelaksanaan.

3. Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja

Aspek keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja berkaitan dengan bagaimana penyusunan kinerja di Kementerian/Lembaga telah disesuaikan substansinya dengan rencana pembangunan nasional. Sehingga, nantinya apa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dapat secara langsung berhubungan dengan usaha pencapaian pembangunan secara nasional dan tidak hanya untuk pencapaian institusinya saja.

HASIL PEMBAHASAN PENILAIAN INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (IPPN) KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2025

Nama Instansi : Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Unit Kerja Mitra K/L : Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi
Kementerian PPN/Bappenas
Total Nilai : 66,00
Nilai Maksimum : 66,00
Total Nilai Penyesuaian : 100,00
Predikat : Sangat Baik

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Rata-rata Keselarasan Terbobot (Pembulatan)
1 Integrasi	1.a Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN	1.a.1 Muatan dalam Renstra K/L Sesuai dengan Muatan (sasaran, target, satuan target) di dalam RPJMN	29	29
	1.b Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L	1.b.1 Muatan (Sasaran (strategis, program, kegiatan), RO, target dan satuan target) dalam Renja K/L Konsisten dengan Muatan di dalam Renstra K/L	13	13
	1.c Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP	1.c.1 Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RKP	14	-
		1.c.2 Target dan Satuan Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Target dan Satuan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RKP		
		1.c.3 Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP	14	14
		1.c.4 Target dan Satuan Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Target dan Satuan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP		
2 Sinkronisasi	2.a Kepatuhan Anggaran K/L untuk Membiayai Output Prioritas RKP pada Tahun Perencanaan	2.a.1 Anggaran Output Prioritas dalam RKA K/L pada Tahun Perencanaan Sesuai dengan Anggaran Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP	Tidak dilakukan penilaian pada IPPN 2025	-
	2.b Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L	2.b.1 Total Pagu Anggaran dalam RKA K/L Sesuai dengan Total Pagu Anggaran pada Renja K/L	10	10
	2.c Kepatuhan Anggaran K/L untuk Membiayai Output	2.c.1 Anggaran Output Prioritas dalam RKA K/L pada Tahun Pelaksanaan Sesuai dengan Anggaran Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP	10	10
Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Rata-rata Keselarasan Terbobot (Pembulatan)
	Prioritas RKP pada Tahun Pelaksanaan			
3 Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	3.a Target dan Sasaran Prioritas Nasional menjadi Target dan Sasaran Kinerja Instansi terkait	3.a.1.a Indikator Sasaran PN/PP/KP yang ditugaskan Menjadi IKU Instansi Terkait	10	-

Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung sasaran 1, pagu yang tersedia pada awal PK untuk RO EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal adalah Rp 1.015.000.000 namun dikarenakan adanya berbagai macam dinamika kebijakan sepanjang tahun 2025, maka Pagu Anggaran untuk mendukung sasaran ini sebesar Rp 551.740.000 dan realisasi sebesar Rp 478.195.000, dengan serapan anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar 86,67%.

RO	Pagu	Realisasi anggaran	Capaian
EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	551.740.000	478.195.000	86,67%

Faktor yang menjadi penyebab anggaran tidak terserap maksimal adalah karena adanya kebijakan efisiensi pada triwulan pertama tahun 2025, dan adanya prioritas kegiatan dan kebijakan secara internal dan eksternal sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

No	Sasaran	Indikator	Formula	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.	Nilai capaian RB pengelolaan keuangan	Penjumlahan skor index IKPA dan Opini BPK	6,85	6,80	99,27%

Skor indeks IKPA pada tahun 2026 setelah sanggah adalah 1,80 dengan capaian indeks 92,50 %

Analisis Capaian Kinerja IKPA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah alat evaluasi yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja (Satker). IKPA bertujuan memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan pendekatan berbasis indikator kinerja, IKPA membantu mengidentifikasi permasalahan dan memberikan arahan untuk perbaikan pengelolaan anggaran pemerintah

Komponen utama IKPA mencakup beberapa aspek, seperti ketepatan penyerapan anggaran, efisiensi belanja, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, dan ketepatan penyelesaian tagihan. Selain itu, IKPA juga menilai penyampaian data yang akurat, pencapaian output kegiatan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian yang menyeluruh ini memungkinkan Satker untuk memahami kelemahan dalam pengelolaan anggaran sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaannya.

Tujuan utama dari penerapan IKPA adalah mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan anggaran. Dengan mekanisme penilaian ini, pemerintah dapat memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Selain itu, IKPA berfungsi sebagai alat monitoring untuk mengidentifikasi potensi kendala atau deviasi dalam pelaksanaan anggaran, sehingga langkah korektif dapat segera dilakukan.

Penilaian IKPA menggunakan skala 0 hingga 100, dengan indikator yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nilai tinggi menunjukkan pelaksanaan anggaran yang optimal, sedangkan nilai rendah menjadi tanda perlunya perbaikan dalam tata kelola anggaran. Nilai ini juga menjadi salah satu acuan dalam evaluasi kinerja Satker secara keseluruhan dan sebagai bahan laporan kepada pimpinan instansi atau kementerian.

Dengan implementasi IKPA yang baik, pemerintah dapat mengoptimalkan pengelolaan anggaran untuk mendukung pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab. Pemahaman mendalam tentang IKPA akan membantu Satker meningkatkan kinerja anggaran, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah alat evaluasi yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja (Satker). IKPA bertujuan memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan pendekatan berbasis indikator kinerja, IKPA membantu mengidentifikasi permasalahan dan memberikan arahan untuk perbaikan pengelolaan anggaran pemerintah.

Komponen utama IKPA mencakup beberapa aspek, seperti ketepatan penyerapan anggaran, efisiensi belanja, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, dan ketepatan penyelesaian tagihan. Selain itu, IKPA juga menilai penyampaian data yang akurat, pencapaian output kegiatan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian yang menyeluruh ini memungkinkan Satker untuk memahami kelemahan dalam pengelolaan anggaran sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaannya.

Tujuan utama dari penerapan IKPA adalah mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan anggaran. Dengan mekanisme penilaian ini, pemerintah dapat memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Selain itu, IKPA berfungsi sebagai alat monitoring untuk mengidentifikasi potensi kendala atau deviasi dalam pelaksanaan anggaran, sehingga langkah korektif dapat segera dilakukan.

Penilaian IKPA menggunakan skala 0 hingga 100, dengan indikator yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nilai tinggi menunjukkan pelaksanaan anggaran yang optimal, sedangkan nilai rendah menjadi tanda perlunya perbaikan dalam tata kelola anggaran. Nilai ini juga menjadi salah satu acuan dalam evaluasi kinerja Satker secara keseluruhan dan sebagai bahan laporan kepada pimpinan instansi atau kementerian.

Dengan implementasi IKPA yang baik, pemerintah dapat mengoptimalkan pengelolaan anggaran untuk mendukung pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab. Pemahaman mendalam tentang IKPA akan membantu Satker meningkatkan kinerja anggaran, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

No.	Periode	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispersi SPK (Pengering)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Berdik DIPA	Deviasi Halaman III	Penyerapan Anggaran	Belanja Konstruktif	Penyelesaian Tagihan	Pengeluaran UP dan TUP	Capaian Output				
3	Desember	005	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPR)	Nilai	77,50	74,83	95,00	95,82	95,49	93,40	97,79	95,00	100%	0,50	95,28
				Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
				Nilai Akhir	7,75	11,22	15,07	8,58	9,95	8,34	24,45				
				Nilai Aspek	76,17			93,14			97,79				

Pada tahun 2025, Nilai IKPA yang digunakan pada Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2025 merupakan nilai IKPA TA 2024, dengan skor indeks 1,85 dan capaian indeks 92,5%.

Perolehan nilai IKPA 3 tahun terakhir

Tahun	2023	2024	2025
Nilai IKPA	95,85	92,61	90,16

Faktor kegagalan dan hambatan :

- 1.Staf PPK kadang tidak mengupdate target dan capaian output sesuai dengan informasi kinerja.
- 2.Belum sesuai rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja yang sesuai dengan jenis dan periode.
- 3.Kadang sulit eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
- 4.Kadang sulit melaksanakan realisasi sesuai SBK, sehingga efisiensi SBK dapat tercapai.
- 5.Adanya dinamika kebijakan terkait pelaksanaan anggaran di tahun 2025 menyebabkan indikator kualitas perencanaan anggaran tidak mencapai target.

Rencana tindak lanjut tahun 2026 :

- 1.Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran.
- 2.Melaksanakan rekomendasi IKPA Tahun 2025.

Mengingat capaian terendah terdapat pada indikator Revisi DIPA, maka kedepannya diharapkan :

- 1.Melakukan rewiu atas DIPA secara periodik (minimal sekali dalam satu triwulan) untuk melihat kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/Output dalam DIPA dengan kebutuhan satker.
- 2.Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisasi.
- 3.Segera membuka blokir anggaran yang masih dalam kendali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaikan sejak awal tahun.



Foto Kegiatan Bimbingan penginputan Capaian Output untuk IKPA pada 28 November 2025.

Realisasi Anggaran IKPA

Untuk realisasi anggaran untuk nilai IKPA menggunakan anggaran RO EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal sebesar Rp 2.114.500, namun dikarenakan ada revisi sehingga menjadi Rp 1.919.670.000 dengan realisasi Rp 1.725.293.646 atau capaian anggaran 89,87%.

RO	Pagu	Realisasi anggaran	Capaian
EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.919.670.000	1.725.293.646	89,87%.

Faktor penyebab keberhasilan anggaran karena perubahan aturan dan kebijakan keuangan yang berubah, menjadikan anggaran tidak dapat terserap 100%.

Analisis Capaian Kinerja Opini BPK

Opini BPK atas laporan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI Meningkatnya layanan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel dapat diukur capaian kinerjanya dengan capaian tertinggi opini BPK atas Laporan Keuangan DPD RI. Opini merupakan pernyataan resmi yang merupakan simpulan pemeriksa terhadap tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria capaian indikator kinerja berdasarkan opini BPK adalah sebagai berikut.

Tabel Kriteria Capaian Indikator Kinerja Opini BPK

No.	Kriteria Opini	% Kesesuaian
1	Wajar Tanpa Pengecualian	100%
2	Wajar Dengan Pengecualian	80%
3	Tidak Wajar	60%
4	Tidak Memberikan Opini	40%

Pemberian opini BPK atas Laporan Keuangan Setjen DPD mengacu pada beberapa kondisi dibawah ini:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (Adequat Disclosure);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Pada tahun 2025, Sekretariat Jenderal DPD RI berhasil mempertahankan predikat WTP sehingga skor indeks Opini BPK adalah 5 dengan capaian kinerja laporan keuangan DPD RI adalah 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mengelola laporan keuangan DPD RI sangat baik.

Tercapainya opini WTP tersebut dikarenakan Sekretariat Jenderal DPD RI telah didukung oleh pegawai yang menguasai permasalahan pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam hal penatausahaan dan tata pembukuan keuangan negara. Dengan demikian, penyajian laporan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI oleh BPK RI dinilai telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sekretariat Jenderal DPD RI senantiasa berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tercapainya opini WTP tersebut juga dikarenakan Sekretariat Jenderal DPD RI selalu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar dalam perencanaan dan penggunaan anggaran selalu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, di mana setiap awal periode penganggaran selalu diawali dengan koordinasi antar unit kerja dalam penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Faktor sukses selanjutnya adalah Sekretariat Jenderal DPD RI selalu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar dalam perencanaan dan penggunaan anggaran selalu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, di mana setiap awal periode penganggaran selalu diawali dengan koordinasi antar unit kerja dalam penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

19x WTP Atas Laporan Keuangan TA 2006 s/d 2024

- Laporan Keuangan semester I dan Triwulan III telah disampaikan kepada Menteri Keuangan
- Laporan PIPK telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan APIP

Langkah-langkah 2026 :

- Menyusun Laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kecukupan pengungkapan
- Pelaksanaan anggaran patuh terhadap ketentuan perundang-undangan.
- Efektifitas Sistem Pengendalian Intern



Rapat Tripartit (DPD, BPK dan Kemenkeu) 30 April 2025



Rekonsiliasi Tiga Pihak dalam Penyusunan Asersi Final LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun 2024 (Audited) 30 April 2025.

Realisasi Anggaran Opini BPK

RO	Pagu	Realisasi	Capaian
EBA – Layanan Dukungan Manajemen Internal	195,600,285,000	191,279,922,449	97.79%

Faktor penyebab realisasi anggaran tidak maksimal karena adanya kebijakan efisiensi dan dinamika peraturan eksternal dan internal.

3. Sasaran 3 : Meningkatnya pengelolaan prioritas nasional.

No	Sasaran	Indikator	Formula	Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatnya pengelolaan prioritas nasional	Nilai capaian pengelolaan prioritas nasional	Penjumlahan skor indeks Capaian Prioritas Nasional dan Capaian IKU Kementerian/Le mbaga	5,97	6,87	115%

Analisis Capaian Prioritas Nasional (PN)

Capaian Prioritas Nasional (PN) pada tahun ini merupakan refleksi dari keberhasilan integrasi antara mandat konstitusional lembaga dengan agenda pembangunan makro yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam kerangka Reformasi Birokrasi, indikator ini menjadi krusial karena mengukur sejauh mana birokrasi tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi memberikan dampak nyata bagi skala nasional. Pada tahun 2025, Sekretariat Jenderal DPD RI memperoleh skor indeks capaian Prioritas Nasional 2,06% dengan capaian indeks 68,33%. Hal ini meninggalkan catatan yaitu perlu dipertahankan kinerja IKSS yang telah dicapai dengan memperhatikan konsistensi perencanaan dan penganggaran antara RKP dan Renja pada periode tahun berjalan.

Baseline Nilai Tahun 2024 : 100

Target Nilai Tahun 2025 : 100

Realisasi : 100

Menu

</

Menu

RKP 2025

Beranda

Pelaporan

- Rincian Output
- Critical Path
- KP

BIRO ORGANISASI, KEANGGOTAAN DAN KEPEGAWAIAN

Pengendalian Kegiatan Prioritas

Informasi

Tahun : 2025

K/L : [095] - DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

UK Eselon I : [01] - Sekretariat Jenderal DPD RI

UK Eselon II : [11] - Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian

Kegiatan Prioritas

Kode & Nomenklatur	K/L Pengampu	Fisik					Anggaran			Pelaksanaan (% kumulatif)		# Aksi
		Target	Realisasi	Satuan	%	Status	Alokasi	Realisasi	%	Status	%	
KP 01.03.01							458.562.000	205.476.000	44,8			
Penguatan Fungsi Legislatif Lembaga Legislatif												
10.WA.3856.SCA.001	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	456,0	456,0	Orang	100,00		229.281.000	205.476.000	89,6			
Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengoperasian Sistem Informasi												

</

Pada tahun 2025 kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

- 1.Penyusunan Renstra DPD 2025-2029 telah menggunakan indikator kinerja atas setiap Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang memenuhi kriteria SMART dan cukup.
- 2.Penetapan dokumen Renstra DPD 2025-2029 melalui Peraturan Sesjen DPD Nomor 13 Tahun 2025.
- 3.Sasaran kinerja pada PK Sekretariat Jenderal DPD RI telah menggunakan indikator Reformasi Birokrasi.
- 4.Penyusunan Pohon Kinerja telah menggunakan Critical Success Factor (CSF) dan penjenjangan kinerja pada setiap sasaran kinerja pada Renstra DPD 2025-2029 telah sesuai dengan Permenpanrb Nomor 89/2021.
- 5.Penetapan IKU Setjen DPD dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPD Nomor 989 Tahun 2025.

6. Pemanfaatan aplikasi eKinerja berupa pemutakhiran aplikasi eKinerja, seluruh dokumen SAKIP telah diupload dalam aplikasi eKinerja dan telah dilakukan Sosialisasi penggunaan aplikasi eKinerja.
7. Penetapan Persesjen Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Setjen DPD telah mengatur mengenai Pelaporan Kinerja.
8. Terkait proses evaluasi SAKIP internal, telah dilakukan perbaikan kualitas LHE AKIP Internal, tindak lanjut LHE AKIP Internal dan Bimtek evaluasi AKIP Internal oleh Evaluator KemenPANRB.

Faktor keberhasilan dalam Capaian PN :

Pihak eksternal seperti Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan bersama dengan seluruh unit terkait di Sekretariat Jenderal terus melakukan pengendalian setiap triwulan terhadap output dalam RO Prioritas Nasional sepanjang tahun 2025.

Kendala dalam capaian PN :

Adanya dinamika kebijakan perencanaan dan penganggaran sepanjang tahun 2025.

Rencana aksi tindak lanjut 2026 : Pencapaian kinerja harus optimal dalam mencapai IKSS, IKP, IKK dan RO yang mendukung PN pada Tahun 2026.

Realisasi Anggaran Prioritas Nasional (PN)

Anggaran untuk capaian PN menggunakan kolaborasi dengan unit lain, dikarenakan PN terkait dengan Biro/Pusat selain Biro Perencanaan dan Keuangan yang lain yaitu Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian, Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi, dan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran.

PENGUNGKAPAN CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL								
TAHUN ANGGARAN 2025								
Unit Organisasi	: Sekretariat Jenderal DPD RI							
Satuan Kerja	: Sekretariat Jenderal DPD RI							
Kode	Program/ Kegiatan Prioritas	PAGU	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
095.01.WA	Program Dukungan Manajemen							
3856	Penatausahaan Organisasi dan Tata Laksana, Keanggotaan, Pengembangan SDM, dan Advokasi Hukum							
SCA	PELATIHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
001	PENINGKATAN KAPASITAS SDM DALAM PENGOPERASIAN SISTEM INFORMASI	229,281,000	205,476,000	89.62%	orang	456	456	100%
3859	Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi, Riset dan Dokumentasi							
UAB	SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN							
001	SISTEM INFORMASI BAGI ANGGOTA LEGISLATIF DAN KONSTITUEN	2,600,400,000	2,588,679,833	99.55%	Sistem Informasi	4	4	100%
095.02. CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan							
3962	Pengkajian Aspirasi Masyarakat dan Kebijakan Anggaran Daerah							
PBC	KEBIJAKAN BIDANG POLITIK							
001	PENGLOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH	1,775,550,000	1,757,700,171	98.99%	Rekomendasi Kebijakan	5	5	100%

Analisis Capaian IKU

Pada tahun 2025, skor indeks capaian IKU Kementerian/Lembaga adalah 4,81 dengan capaian indeks 68,71%, dengan catatan yaitu seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaporkan telah mencapai target kinerja lebih dari 90%, dengan rekomendasi mempertahankan konsistensi capaian kinerja melalui penguatan monitoring dan evaluasi serta mendorong peningkatan kualitas target IKU pada periode berikutnya.

Baseline Nilai Tahun 2024 : 83,33

Target Nilai Tahun 2025 : 85

Capaian : 100

The screenshot displays the 'RENJA 2025' interface. The left sidebar contains navigation options: Beranda, Dashboard, Pencarian Data, Menu Utama, Pemantauan, Indikator, Indikator SS, Indikator KP, Indikator KK, Lokasi Satker, Verifikasi, Unduh Data, Capaian, Konfirmasi Data, and KRISNA. The main content area is divided into 'Informasi' and 'Kegiatan' sections. The 'Informasi' section shows the year 2025, K/L as DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD), and two UK Eselon II: Sekretariat Jenderal DPD RI and Biro Perencanaan dan Keuangan. The 'Kegiatan' section is a table with columns 'Kode & Nomenkelatur' and '% Laporan'. It lists several activities with their respective indicators and report percentages, all marked with green dots indicating 100% completion.

Kode & Nomenkelatur	% Laporan
3857 - Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan DPD RI	100%
01 - Terlaksananya pengelolaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang berkualitas	100%
01 - Nilai capaian RB pengelolaan kinerja	100%
02 - Terlaksananya pengelolaan keuangan Setjen yang transparan dan akuntabel	100%
01 - Nilai capaian RB pengelolaan keuangan Setjen	100%
04 - Meningkatnya Pelaksanaan area perubahan penguatan akuntabilitas reformasi birokrasi Setjen DPD RI	100%
01 - Nilai Penguatan Akuntabilitas	100%
05 - Meningkatnya Pelaksanaan RB di Lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan	100%
01 - Rasio Rencana Aksi RB lingkup biro Perencanaan dan Keuangan yang Terlaksana terhadap total rencana aksi RB Biro Perencanaan dan Keuangan	100%

Analisis hal-hal yang dilakukan dalam capaian IKU adalah :

- Melaksanakan semua IKU sesuai dengan target 2025
- Telah membuat kamus indikator kinerja sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan formulasi perhitungan
- Penetapan IKU melalui Persesjen No.989 Tahun 2025 tentang IKU Sesjen DPD.

Hambatan/kendala dalam capaian IKU :

- Dalam LHE RB untuk nilai capaian IKU diumumkan terlambat setelah tahun berakhir, dan tidak ada rekomendasi/catatan.

Realisasi Anggaran IKU

Dalam rangka pencapaian IKU, seluruh pegawai di DPD RI bekerjasama sehingga target dapat tercapai. Anggaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai tersebut tercermin dalam realisasi sebagai berikut.

RO	Pagu	Realisasi	Capaian
EBA – Layanan Dukungan Manajemen Internal	373.018.753.000	365.622.961.134	98,02%

Faktor penyebab keberhasilan realisasi anggaran tinggi adalah karena dalam layanan perkantoran merupakan anggaran operasional untuk gaji dan tunjangan Anggota DPD pegawai ASN dan non ASN.

4. Sasaran 4 : Meningkatnya upaya mengatasi permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

No	Sasaran	Indikator	Formula	Target	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya upaya mengatasi permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.	Nilai capaian RB upaya mengatasi permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat	Penjumlahan skor indeks capaian RB Tematik	8,18	7,55	92%

Indikator ini diukur melalui kerangka RB Tematik, yang mengevaluasi sejauh mana intervensi birokrasi mampu memberikan solusi atas permasalahan publik. Melalui integrasi perencanaan dan penganggaran yang presisi, Biro Perencanaan dan Keuangan memastikan dukungan terhadap pilar-pilar RB Tematik berjalan secara optimal.

Pada tahun 2025, nilai untuk RB tematik menggunakan nilai tahun 2024, sehingga skor indeks pada RB Tematik mencapai skor maksimal, namun untuk rencana aksi pada RB tematik, menggunakan tematik pada tahun 2025.

RB Tematik - Perencanaan - LKE KEMENPANRB						
No.	Tema	Sasaran Tematik Roadmap	Indikator	Target	Satuan Target	Realisasi
1	Pengentasan Kemiskinan	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Jumlah analisis pengawasan, kajian akademik RUU, pertimbangan,	8	Dokumen	8
1	Pengentasan Kemiskinan	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Jumlah tulisan artikel/policy tracing terkait tematik pengentasan ki	24	Dokumen	24
1	Pengentasan Kemiskinan	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi dengan Menteri terkait P	10	Kegiatan	10
2	Realisasi Investasi	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Jumlah analisis pengawasan, kajian akademik RUU, pertimbangan,	8	Dokumen	8
2	Realisasi Investasi	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Jumlah tulisan artikel/policy tracing terkait tematik Realisasi Invest	16	Dokumen	16
2	Realisasi Investasi	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi dengan Menteri terkait R	6	Kegiatan	6
3	Hilirisasi	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Jumlah analisis pengawasan, kajian akademik RUU, pertimbangan,	2	Dokumen	2
3	Hilirisasi	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Jumlah tulisan artikel/policy tracing terkait tematik Hilirisasi dalam	4	Dokumen	4
3	Hilirisasi	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi dengan Menteri terkait H	4	Kegiatan	4
4	Ketahanan Pangan Nasional	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Jumlah analisis pengawasan, kajian akademik RUU, pertimbangan,	2	Dokumen	2
4	Ketahanan Pangan Nasional	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Jumlah tulisan artikel/policy tracing terkait tematik Ketahanan Pan	2	Dokumen	2
4	Ketahanan Pangan Nasional	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dengan Menteri terkait Ketahar	2	Kegiatan	2
5	Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Jumlah analisis pengawasan, kajian akademik RUU, pertimbangan,	2	Dokumen	2
5	Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Jumlah tulisan artikel/policy tracing terkait tematik Kualitas dan Ak	2	Dokumen	2
5	Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dengan Menteri terkait Kualitas	2	Kegiatan	2
6	Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Jumlah analisis pengawasan, kajian akademik RUU, pertimbangan,	2	Dokumen	2
6	Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Jumlah tulisan artikel/policy tracing terkait tematik Peningkatan Ak	2	Dokumen	2
6	Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dengan Menteri terkait Peningk	2	Kegiatan	2

Pengentasan Kemiskinan

Skor Indeks	Capaian Indeks
1,25	62,5%

TEMA RB TEMATIK

Media Nusa	3	Link (klik disini)
Kajian	7	Link (klik disini)
Policy Tracing	4	Link (klik disini)
Isu Harian	42	Link (klik disini)

Kemiskinan



Output :

- Inventarisasi Materi Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Inventarisasi Materi Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- Policy Brief : Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Sebagai Model Koperasi Digital Untuk Mendorong Kemandirian Ekonomi Desa

Realisasi Investasi

Skor Indeks	Capaian Indeks
1,54	77%

TEMA RB TEMATIK

Media Nusa	4	Link (klik disini)
Kajian	6	Link (klik disini)
Policy Tracing	8	Link (klik disini)
Isu Harian	62	Link (klik disini)

Investasi



Output :

- Artikel isu harian : BI Menahan Penurunan Suku Bunga
- Artikel Isu Harian : Satu Tahun Prabowo di Sektor Keuangan.

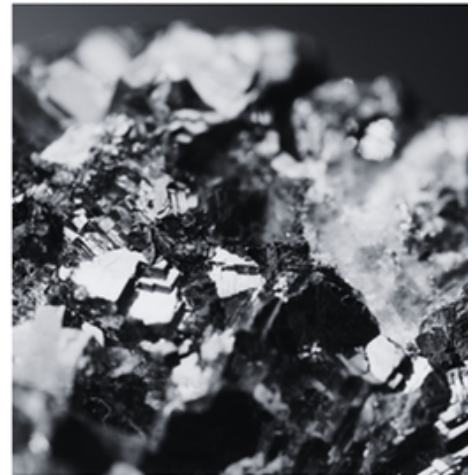
Hilirisasi

TEMA RB TEMATIK

Media Nusa	3	Link (klik disini)
Kajian	4	Link (klik disini)
Policy Tracing	0	Link (klik disini)
Isu Harian	20	Link (klik disini)



Hilirisasi



Output :

- Dukungan kajian, analisis pengawasan, tulisan policy tracing terkait Perubahan UU Minerba: Implikasi Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambahan Bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan dan Sektor UMKM Bagi Daerah dan Peran Strategis DPD RI.

Ketahanan Pangan Nasional

TEMA RB TEMATIK

Media Nusa	4	Link (klik disini)
Kajian	4	Link (klik disini)
Policy Tracing	5	Link (klik disini)
Isu Harian	15	Link (klik disini)

Ketahanan Pangan Nasional



Output :

- Tulisan kajian, dengan judul : Dalam segelas susu berdikari atau impor
 - Tantangan mewujudkan ketahanan pangan di era pemerintahan Prabowo Gibran
 - Menjaga pangan, menjaga bangsa menuju swasembada pangan berkelanjutan
 - penambahan anggaran kementan 2026 untuk swasembada
 - Sumbang lumbung pangan

Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan

TEMA RB TEMATIK

Media Nusa	4	Link (klik disini)
Kajian	4	Link (klik disini)
Policy Tracing	6	Link (klik disini)
Isu Harian	15	Link (klik disini)

Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan



Output :

- Transformasi Kebijakan Gizi : Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis Dalam Menurunkan Stunting di Indonesia
- Dampak Positif Makan Bergizi Gratis Dalam Upaya Penurunan Stunting

Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan

TEMA RB TEMATIK

Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan

Media Nusa	2	Link (klik disini)
Kajian	4	Link (klik disini)
Policy Tracing	6	Link (klik disini)
Isu Harian	27	Link (klik disini)



Output :

Telah menyusun kajian, yaitu:

- Meneguhkan Identitas Bangsa Melalui Penguatan Pendidikan, Sosial, dan Kebudayaan
- Inventarisasi Materi Pengawasan DPD RI Atas UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Khususnya Program Makan Bergizi Gratis

Telah menyusun Policy Brief, yaitu:

- Makan Bergizi Gratis Sebagai Salah Satu Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- Pengawasan Atas Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Khususnya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 dan Inventarisasi Materi Revisi UU Sisdiknas

Telah menginventarisir Isu Harian, yaitu:

- Peningatan Kualitas Pendidikan di Daerah
- Bersuara di Atas Panggung, Kehilangan Pekerjaan di Sekolah
- Analisis Singkat Bebas Biaya Sekolah SD/SMP Pasca Putusan Mahkamah
- Carut Marut Pelaksanaan SPMB Tahun 2025
- Paradgima Baru Penerimaan Peserta Didik Baru
- Kontradiksi Pemangkasan Anggaran Pendidikan dan Target Indonesia Emas 2045
- Eksklusivitas Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Dalam Sistem Pendidikan di Indonesia
- Bubar Paksa Retret Pelajar: Ujian Nyata Toleransi Agama
- Analisa Singkat: Reformasi Kebijakan Gaji dan Motivasi Pengajar Sebagai Akibat dari Rendahnya Gaji Guru Honorer Sebagai Masalah Struktural
- Kasus Bullying di Sekolah
- Reorientasi Dana Hibah Pesantren Dalam Perspektif Tata Kelola Anggaran Daerah
- Urgensi Evaluasi Prasarana Pembelajaran Berkaca kasus Robohnya ponpes
- Kekerasan dan Seksualitas di Pesantren
- Kesenjangan Akses Pendidikan Inklusif
- Memoles Anggaran Pendidikan 2026 dengan Anggaran Makan
- Mandatory Dana Pendidikan Terpenuhi
- Polemik Jam Masuk Sekolah Lebih Pagi di Kota Bekasi
- Pandangan Singakt Fenomena Pelajar SMA Ikut Demo ke Jalan
- Tantangan Biaya Pendidikan

Analisis Capaian Kinerja RB Tematik

Faktor-faktor yang menyebabkan sasaran ini dapat berhasil karena Biro Perencanaan dan Keuangan bekerjasama dengan Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian juga dengan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran.

Realisasi Anggaran RB Tematik

RO	Pagu	Realisasi	Capaian
EBD – Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.034.062.000	727.631.932	70,37%

Faktor penyebab realisasi untuk sasaran nomor 4 ini tidak maksimal dikarenakan untuk RB tematik Biro Perencanaan dan Keuangan juga menggunakan anggaran di Pusat Kajian Daerah dan Anggaran dan Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian.

BAB IV

Realisasi Biro Perencanaan dan Keuangan

Pagu Anggaran untuk Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 199,105,757,000 dengan realisasi sebesar Rp 194,211,043,029 dengan capaian sebesar 97.54%.

Biro	Pagu	Realisasi	Capaian
Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI	199,105,757,000	194,211,043,029	97.54%

BAB V

Penutup

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2025 ini disusun sebagai dokumen pertanggungjawaban yang menyajikan gambaran komprehensif mengenai pencapaian, dinamika tantangan, serta langkah mitigasi yang telah dilaksanakan. Secara umum, seluruh target kinerja yang ditetapkan bagi Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2025 telah berhasil dicapai dengan hasil yang optimal, mencerminkan efektivitas tata kelola perencanaan dan anggaran yang akuntabel.

Keberhasilan ini merupakan manifestasi dari kerja keras, dedikasi, serta sinergi yang solid antara seluruh jajaran Biro dengan para mitra kerja terkait. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan berorientasi pada hasil. Meskipun target telah terpenuhi, kami menyadari bahwa tuntutan publik terhadap kualitas birokrasi terus berkembang.

Sebagai langkah tindak lanjut, strategi utama kami di masa mendatang adalah mengakselerasi dan meningkatkan inovasi di tengah mengingat kebijakan efisiensi yang berlaku. Fokus akan diarahkan pada pengembangan sistem kerja yang lebih adaptif, digital, dan responsif guna memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak yang semakin luas. Kami senantiasa mengharapkan masukan serta saran konstruktif dari para pemangku kepentingan demi penyempurnaan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan DPD RI secara berkelanjutan.